

TINJAUAN YURIDIS PADA PROSEDUR PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONCENT)

(Studi di Rumah Sakit Kristen Mojowarno)

Adonis Puji Giovanni¹ Alie Zainal Abidin

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Adonis Puji Giovanni

adonisgiovanni08@gmail.com

Abstract

Analyzing initiatives to raise the standard of public services in Singosari District is the goal of this research. We conducted in-depth interviews with employees and members of the public as informants using a descriptive qualitative methodology. According to the findings, Singosari District has made a number of attempts to enhance public services, such as distributing workloads evenly among staff members, increasing staff competence via frequent training, and streamlining digital services to make them easier for the general public to use. Additionally, efficient service delivery is supported by sufficient infrastructure and facilities, and public participation in active service supervision promotes accountability. However, challenges persist, including unequal facility distribution and a shortage of human resources. In order to guarantee that public services in Singosari District are more effective, efficient, and responsive to community demands, this research comes to the conclusion that these efforts need to be further improved.

Keywords: Informed Consent, Health Law

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis inisiatif untuk meningkatkan standar pelayanan publik di Kabupaten Singosari. Pegawai dan masyarakat diwawancarai secara mendalam sebagai informan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, Kabupaten Singosari telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti mendistribusikan beban kerja secara merata di antara staf, meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan yang rutin, dan menyederhanakan layanan digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, penyediaan layanan yang efisien didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai, dan partisipasi publik dalam pengawasan layanan secara aktif mendorong akuntabilitas. Namun, masih terdapat tantangan seperti distribusi fasilitas yang tidak merata dan kekurangan sumber daya manusia. Untuk menjamin pelayanan publik di Kabupaten Singosari lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Kata Kunci: Informed Consent, Hukum Kesehatan